



MENINJAU PROGRAM SEKOLAH RAKYAT DAN SEKOLAH UNGGULAN GARUDA

Pendidikan Inklusi atau Justru
Stratifikasi Sosial?

Sorot Kebijakan

Meninjau Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda: Pendidikan Inklusi atau Justru Stratifikasi Sosial?



Pengarah:

- Muhammad Iqbal Khatami
- Moch Edward Trias Pahlevi
- Azka Abdi Amrurobbi

Peneliti:

- Astri Kusmarianti
- Muhammad Taufik Ridho

Editor dan Kurator:

- Muhammad Iqbal Khatami

Penyuntingan dan Tata Letak: Muda Bicara ID

www.mudabicara.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Ringkasan Eksekutif

Program Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Unggulan Garuda (SUG) diluncurkan pemerintah pada 2025 untuk mengatasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi kelompok miskin ekstrem dan siswa berprestasi. Namun, kajian kritis menunjukkan kedua kebijakan ini berisiko mempertebal segregasi dan stratifikasi pendidikan.

SR, yang dikelola Kementerian Sosial, rawan menjadi “sekolah kelas dua” dan menambah stigma sosial, sementara SUG cenderung menguntungkan siswa dari keluarga mampu sehingga memperkuat elitisme pendidikan. Kritik utama mencakup kurangnya data target siswa, mekanisme seleksi yang belum jelas, dan potensi pengabaian terhadap sekolah reguler yang masih kekurangan fasilitas.

Oleh karena itu, direkomendasikan agar pengelolaan SR dialihkan sepenuhnya ke Kementerian Pendidikan, memperkuat integrasi siswa miskin di sekolah reguler melalui beasiswa dan subsidi, serta memastikan seleksi SUG berbasis potensi dan latar belakang sosial-ekonomi. Pemerintah juga perlu memprioritaskan perbaikan sekolah reguler, transparansi anggaran, serta kolaborasi antar sekolah untuk mencegah segregasi sosial. Kebijakan ini harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang reformasi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, bukan solusi ad hoc atau proyek politis.

01. Pendahuluan:

Tepatkah Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sebagai Solusi?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia sangat tinggi pada usia 7-12 tahun (99,19%) dan 13-15 tahun (96,17%), namun turun tajam pada usia 16-18 tahun (74,64%) dan anjlok di usia 19-23 tahun (29,01%). Penurunan APS paling signifikan terjadi di jenjang SMA/SMK.

Data lain menunjukkan Negara kita saat ini sedang mengalami ketertinggalan dalam kualitas pendidikan baik formal maupun informal (Rahmat & Artikel, 2018).

Ketimpangan ini diperparah oleh faktor ekonomi, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kualitas pendidikan, sehingga banyak anak usia sekolah menengah terpaksa bekerja atau putus sekolah. Secara global, UNESCO mencatat 251 juta anak dan remaja masih putus sekolah, dan kemiskinan menjadi faktor utama pengucilan pendidikan (UNESCO, 2024). Data ini menunjukkan bahwa tantangan utama pendidikan Indonesia bukan hanya pada akses, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan pendidikan di tingkat menengah atas

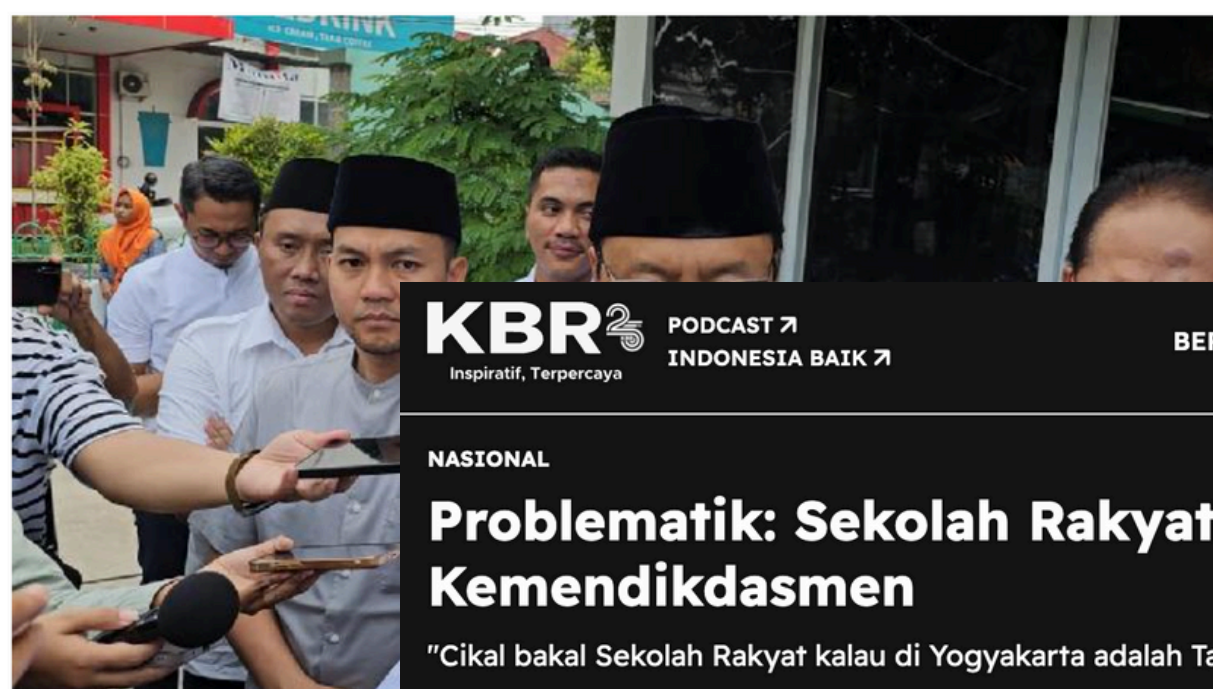
Pemerintah Indonesia, dalam upaya menjawab tantangan ini, meluncurkan dua program strategis pada tahun 2025: Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas dan mengurangi angka putus sekolah di kelompok rentan. Implementasi program ini melibatkan dukungan pemerintah daerah berupa penyediaan lahan dan bangunan asrama, serta perekrutan tenaga pengajar dalam skala besar-sebanyak 61.000 guru dijadwalkan mulai bertugas pada Juli 2025.

Hingga awal tahun ini, sejumlah daerah seperti Lampung, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Pasuruan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Biak Numfor, dan Papua telah mengajukan proposal kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung.

Sekolah Rakyat Dianggap Rawan Diskriminasi, Begini Tanggapan Menteri Sosial

Pelabelan Sekolah Rakyat sebagai sekolah khusus siswa miskin dikhawatirkan akan menyumbangkan stigma negatif yang melekat di diri siswa.

28 Maret 2025 | 07:14 WIB



KBR²
Inspiratif, Terpercaya

PODCAST 7
INDONESIA BAIK 7

BERITA ▼ SAGA RAGAM ARTIKEL PODCAST OPINI

NASIONAL

Problematis: Sekolah Rakyat Ditangani Kemensos, Bukan Kemendikdasmen

"Cikal bakal Sekolah Rakyat kalau di Yogyakarta adalah Taman Siswa."

AUTHOR / **KEN FITRIANI** - EDITOR / **SINDU**

Senin 05 Mei 2025 pukul 11.15 WIB



Bacakan

Bagikan



”

Analisis kritis terhadap Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya menjadi solusi kosmetik, tetapi benar-benar mampu menjawab problem struktural pendidikan Indonesia-khususnya dalam menuntaskan ketimpangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kelompok masyarakat paling rentan

02.

Sekilas Tentang Kebijakan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda

Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda adalah dua kebijakan pendidikan baru Pemerintahan Presiden Prabowo. Sekolah Rakyat fokus pada pemerataan akses pendidikan bagi kelompok miskin, sedangkan Sekolah Garuda menargetkan pengembangan siswa berprestasi untuk bersaing di tingkat global.

Aspek	Sekolah Rakyat	Sekolah Garuda (Unggulan)
Pengelola	Kementerian Sosial + Kemendikbudristek	Kemendiktisaintek
Sasaran	Anak keluarga miskin/miskin ekstrem	Siswa akademik/nonakademik berprestasi
Jenjang Pendidikan	SD, SMP, SMA	SMA
Model Sekolah	Asrama (boarding school), gratis penuh	Asrama, beasiswa penuh, fasilitas modern
Kurikulum	Standar nasional + karakter & keterampilan	Nasional + internasional, holistik
Target Lokasi	100 sekolah, pilot di Jabodetabek	20-40 sekolah di seluruh provinsi
Tujuan	Pemerataan akses & putus rantai kemiskinan	Cetak SDM unggul berdaya saing global



03.

Mempertebal Kesenjangan, Risiko Segregasi, dan Stigma

Sekolah Rakyat (SR) dirancang untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sementara Sekolah Unggulan Garuda (SUG) ditujukan bagi siswa berprestasi yang umumnya berasal dari keluarga mampu. **Pembagian ini menciptakan garis pemisah antara kelas miskin dan kaya dalam dunia pendidikan**

Stigma terhadap Sekolah Rakyat

- Salah satu kritik utama adalah potensi munculnya stigma terhadap Sekolah Rakyat sebagai “sekolah kelas dua” yang hanya menampung anak-anak miskin tanpa meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Pola ini **menciptakan persepsi negatif tentang kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.**

Sekolah Garuda dan Elitisme Baru

- Di sisi lain, Sekolah Unggulan Garuda berisiko menjadi sekolah elit yang hanya dapat diakses oleh anak-anak dengan dukungan pendidikan awal yang baik. Hal ini **semakin memperburuk stratifikasi sosial dan intelektual di masyarakat, memperkuat perbedaan antara anak-anak dari keluarga kaya dan miskin.**

Alih-alih menciptakan pemerataan akses pendidikan, kebijakan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda dikhawatirkan akan semakin memperlebar jurang kualitas pendidikan antara kelompok ekonomi bawah dan menengah.

Skema seperti ini berisiko menimbulkan segregasi sosial yang semakin tajam dan bertentangan dengan prinsip pendidikan nasional yang seharusnya inklusif, non-diskriminatif, dan berkeadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

———— “ ————

04.

Sekolah Rakyat: Salah Kaprah Pendidikan yang Dikelola oleh Kemensos

Urusan pendidikan—termasuk kurikulum, tenaga pengajar, dan tata kelola—merupakan domain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bukan Kementerian Sosial. **Penunjukan Kemensos sebagai pengelola Sekolah Rakyat berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang dapat mengganggu konsistensi dan standar pendidikan nasional.**

- Kemensos tidak memiliki pengalaman dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola institusi pendidikan, sehingga berpotensi mengurangi kualitas dan efektivitas program Sekolah Rakyat.
- Jika keberlanjutan diabaikan dan tidak dikelola dengan baik, program Sekolah Rakyat berisiko hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah ketimpangan pendidikan di Indonesia.



KEMENTERIAN SOSIAL RI





Urgensi Program Sekolah Rakyat juga Dipertanyakan

Lebih lanjut, banyak pihak mempertanyakan urgensi program Sekolah Rakyat. Di tengah banyaknya sekolah konvensional yang masih kekurangan fasilitas, infrastruktur yang rusak, dan kesejahteraan guru yang belum memadai, pembangunan sekolah baru justru dianggap tidak mendesak.

Pemerintah seharusnya lebih fokus pada perbaikan dan penguatan sekolah-sekolah yang sudah ada, talih-alih menambah institusi pendidikan baru yang dikelola oleh kementerian di luar bidang pendidikan.

05.

Sekolah Unggulan **Berpotensi Memperkuat Stratifikasi Pendidikan dan Pengabaian Sekolah Reguler**

Kebijakan pendirian Sekolah Unggulan Garuda mendapat kritik karena dianggap memperburuk stratifikasi pendidikan di Indonesia. Sekolah ini dirancang sebagai institusi elite dengan fasilitas modern, kurikulum internasional, dan asrama, yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa masuk ke universitas top dunia.



Sekolah Garuda lebih menguntungkan siswa dari keluarga yang sudah memiliki akses ke bimbingan belajar mahal, sekolah dengan kurikulum internasional, dan dukungan finansial yang memadai. Hal ini membuat siswa dari keluarga kurang mampu sulit bersaing secara adil.



Sekolah unggulan ini cenderung menjadi sekolah elite, bukan solusi untuk pemerataan akses pendidikan berkualitas.



Pemerintah terkesan lebih fokus pada pembangunan sekolah baru yang prestisius, alih-alih memperbaiki mutu dan fasilitas sekolah-sekolah yang sudah ada.



REKOMENDASI KEBIJAKAN (1/2)

Alihkan Pengelolaan Sekolah Rakyat Sepenuhnya ke Kementerian Pendidikan

- Pendidikan adalah domain Kemendikbudristek, bukan Kementerian Sosial. Pengelolaan oleh Kemensos berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi tata kelola pendidikan.
- Peran Kemensos dapat difokuskan pada dukungan sosial-ekonomi siswa, bukan pengelolaan sekolah. Kolaborasi lintas kementerian harus jelas dalam pembagian peran, dengan Kemendikbudristek sebagai leading sector.

Integrasi Siswa Tidak Mampu dalam Sekolah Reguler

- Pemerintah juga perlu memperluas akses dan afirmasi untuk siswa miskin di sekolah reguler dengan memperkuat skema beasiswa, subsidi, dan dukungan sosial.
- Ditambah dengan penamaan “Sekolah Rakyat” semakin berisiko menambah stigma “sekolah kelas dua” dan segregasi sosial yang mempertebal kesenjangan pendidikan

Desain Seleksi Berbasis Potensi, Bukan Hanya Prestasi Formal

- Seleksi Sekolah Unggulan Garuda perlu mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi dan potensi siswa, bukan sekadar nilai akademik atau prestasi olimpiade. Ini mencegah dominasi siswa dari keluarga mampu yang sudah mendapat akses pendidikan awal berkualitas



REKOMENDASI KEBIJAKAN (2/2)

Transparansi Target, Anggaran, dan Dampak

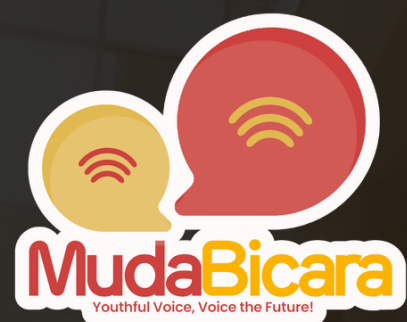
- Pemerintah wajib mempublikasikan target jumlah siswa, mekanisme seleksi, penggunaan anggaran, serta dampak program secara periodik dan transparan

Dorong Interaksi Sosial dan Kolaborasi Antar Sekolah

- Ciptakan program pertukaran siswa, kolaborasi lintas sekolah, dan kegiatan bersama antara SR, SUG, dan sekolah reguler untuk mengurangi segregasi dan membangun solidaritas sosial.

Kebijakan Harus Berorientasi Jangka Panjang dan Berkelanjutan

- SR dan SUG harus dirancang sebagai bagian dari strategi jangka panjang reformasi pendidikan, bukan solusi ad hoc atau proyek politis. Exit strategy perlu disiapkan agar intervensi tidak menimbulkan ketergantungan atau mengabaikan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan



Sorot
Kebijakan

MENINJAU PROGRAM SEKOLAH RAKYAT DAN SEKOLAH UNGGULAN GARUDA

Pendidikan Inklusi atau Justru
Stratifikasi Sosial?